



WALIKOTA BANJARBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/442/KUM/2018

TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap badan publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh semua orang;
- b. bahwa sebagai panduan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37),

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, dengan daftar informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam melakukan pelayanan informasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 1 November 2018



WALIKOTA BANJARBARU,

NADJMI ADHANI

Lampiran : Keputusan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 188.45/442/KUM/2018
 Tanggal: 1 November 2018

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

A. BERSIFAT UMUM

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	SEMUA UNIT KERJA	Disposisi pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
2		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
3		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan
4		Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
5		Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 	Tidak Terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat	Melindungi kerahasiaan dokumen

		belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 		kesuksesan kebijakan	
6		Lokasi server	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
7		Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 	Tidak Terbatas	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses (melindungi kerahasiaan database)
8		Kode Akses Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 pasal 1 angka 16 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
9		Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
10		Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan	Keamanan sistem

			<p>17 huruf j</p> <ul style="list-style-type: none"> UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 		keamanan	
11		Sistem Management Database	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Tidak Terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
12		Informasi hasil rapat pemerintahan (Laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
13		Surat - surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen
14		Peta Lokasi penyimpanan Arsip	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 44	Selama masih berlaku	Mengungkap arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan
15		Materi klarifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai materi klarifikasi berita ditandatangani pimpinan	Dikhawatirkan materi klarifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan keresahan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat
16		Hasil keputusan Rapat pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i 	Sampai keputusan rapat	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan hasil pengambilan kebijakan

				ditindaklanjuti		
17		Alat bukti kasus	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a • UUD Tahun 1945 Pasal 28 D • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h 	Selama proses penanganan kasus	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus
18		Opini hukum		Tidak Terbatas	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum
19		Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah		Tidak terbatas	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkap data pribadi PNS, melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
20		Data Elektronik PNS (Database)	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Tahun 1945 Pasal 28 G • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
21		Dokumen/Berkas/Arsip PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Tahun 1945 Pasal 28 G • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
22		Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/ perceraian	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Tahun 1945 Pasal 28 G • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
23		Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Tahun 1945 Pasal 28 G 	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang

			<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 			bersifat rahasia
24		Data hasil check up perorangan PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Tahun 1945 Pasal 28 G • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak terbatas	Mengungkap pribadi	rahasia Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
25		Daftar Nilai DP3 dan atau SKP PNS	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Tahun 1945 Pasal 28 G • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak terbatas	Mengungkap pribadi	rahasia Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
26		Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Tahun 1945 Pasal 28 G • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak terbatas	Mengungkap pribadi	rahasia Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
27		Berkas/arsip dokumen PNS masing-masing SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • UUD Tahun 1945 Pasal 28 G • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h 	Tidak terbatas	Mengungkap pribadi	rahasia Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
28		Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan i • PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Jo PP No.13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 	Sampai pelantikan	Mengganggu, Menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan, dan kepastian hukum
29		Dokumen kontrak barang/jasa beserta lampirannya	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

			<p>Transaksi Elektronik pasal 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan JAsa Pemerintah pasal 7 huruf b 			
30		Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan JAsa Pemerintah pasal 7 huruf b 	Sampai dengan umur konstruksi	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
31		Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedia barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan JAsa Pemerintah pasal 7 huruf b 	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi ha katas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat

32		Data rencana penempatan PNS/CPNS	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Sampai dengan penyerahan SK Walikota kepada PNS/CPNS	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan obyektif
33		Rencana MoU dengan instansi luar negeri	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf f	Sampai MoU dilaksanakan	Mengganggu proses penyusunan / menghambat kesuksesan kebijakan	Mendukung kesuksesan kebijakan
34		Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf g	Selama masih berlaku	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi
35		Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/Non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin atau Kode Etik Pegawai/Profesi	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan dari PNS ybs	Mengganggu proses penyusunan/mengham bat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengan asas praduga tak bersalah	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia
36		Dokumen/Data proses ijin perceraian pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan dari pegawai ybs	Mengganggu proses penyusunan/mengham bat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia

B. BERSIFAT KHUSUS

NO	SUMBER INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	DISKOMINFO	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	• UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan	Keamanan sistem

			<ul style="list-style-type: none"> UU No. 11 tahun 2008 		membahayakan keamanan	
2		Perangkat khusus persandian	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
3		Penempatan jaringan, peralatan sandi, dan tempat kegiatan sandi	UU No. 11 tahun 2008 huruf c	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
4		Jalur Komunikasi VVIP	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
5		Frekuensi Radio Komunikasi Persandian	UU No. 11 tahun 2008 pasal 17 huruf c	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
6		Sistem keamanan website/aplikasi yang menjadi tanggungjawab Kominfo	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17J	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
7		Setting konfigurasi network Pemko Banjarbaru	UU No. 11 tahun 2008	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
8		Security Network Pemko Banjarbaru	UU No.14 Tahun 2008 pasal 17J	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan	Keamanan sistem

					membahayakan keamanan	
10		Sistem Manajemen Database	UU No. 11 tahun 2008	Selama sistem digunakan	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem
11		Identitas pelapor melalui aplikasi LAPOR!	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan j • UU No.20 tahun 2001 • SE Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 • 	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari pelapor	Mengungkap rahasia pribadi	Dapat meningkatkan partisipasi publik dalam menyampaikan aspirasi karena adanya jaminan dirahasiakannya identitas pelapor
12	BPKAD	Kajian teknis penetapan lokasi dan Basic Design Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan Umum pada 2 Kab/Kota atau lebih	UU no 14 Tahun 2008 huruf b dan e	Sampai terbit surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan	Merugikan ketahanan ekonomi dan menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
13		Rencana pelaksanaan tukar menukar / pemindahtangan asset	UU no 14 Tahun 2008 huruf e	Sampai penandatangan berita acara serah terima	Merugikan ketahanan ekonomi	Memudahkan penatausahaan asset
14		Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah		Sampai dipertanggungjawabkan di DPRD	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

15	BKPP	Dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin Karyawan	UU No 14 Tahun 2008 huruf h	Sampai terbit keputusan Walikota	Mengungkap data pribadi karyawan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi karyawan yang bersifat rahasia
16	BPPRD	Data Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 huruf j • UU No.28 Tahun 2007 Pasal 34 	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
17		Nama Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 huruf j • UU No.28 Tahun 2007 Pasal 34 	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
18		Nomor Objek Pajak (NOP)	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 huruf j • UU No.28 Tahun 2007 Pasal 34 	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
19		Alamat Wajib Pajak/Penangguna Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 huruf j • UU No.28 Tahun 2007 Pasal 34 	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
20		Alamat Kegiatan Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 huruf j • UU No.28 Tahun 2007 Pasal 34 	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
21		Jalan Kegiatan Usaha Wajib Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 huruf j • UU No.28 Tahun 2007 Pasal 34 	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
22		Data Besaran Pajak yang disetorkan setiap wajib pajak	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 huruf j • UU No.28 Tahun 2007 Pasal 34 	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang	Mengamankan data objek pajak dan retribusi
23		Database PBB	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 huruf j 	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data	Mengamankan data objek pajak dan

			<ul style="list-style-type: none"> • UU No.28 Tahun 2007 Pasal 34 		oleh pihak yang tidak berwenang	retribusi
24	BAKESBANGPOL	Data dan informasi intelijen terkait dengan ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan serta penanganan kasus yang berpotensi menimbulkan konflik di daerah	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 huruf c • UU intelejen negara No 17 tahun 2011, permendagri no 16 tahun 2006 	Tidak terbatas	Rentan terhadap ancaman dan keselamatan, keamanan, kedaulatan, keutuhan NKRI	Mencegah terjadinya konflik di daerah
25	BPBD	Foto mayat korban bencana	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan j • Kode etik jurnalistik 	Tidak terbatas	Akan memberikan rasa ketakutan dalam masyarakat Foto korban apalagi yang tidak utuh akan menambah perih keluarga korban yang ditinggalkan	<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah timbulnya rasa ketakutan di masyarakat • Menjaga kondisi psikologis keluarga korban
26	DISDUKCAPIL	Data pribadi penduduk yang memuat : a. No. KK b. NIK c. TTL d. keterangan fisik seseorang e. NIK ibu kandung f. NIK ayah g. Beberapa isi catatan peristiwa penting	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h • UU No 23 tahun 2006 pasal 79, 84 ayat 1 dan pasal 85 	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan data	memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk
27	INSPEKTORAT	Laporan hasil pengawasan, evaluasi, review, dan monitoring baik untuk kegiatan reguler, kasus dan khusus beserta Kertas Kerja Pengawasan (KKP), berita acara pemeriksaan, dan dokumen terkait	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i • PP No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern 	Selama masih berlaku	Menghambat proses pemeriksaan	Memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian tindaklanjut

			<p>Pemerintah</p> <ul style="list-style-type: none"> • PP.No.79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah • Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan intern pemerintah • Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit pengawasan intern pemerintah 			
28	DINKES	Identitas penyandang HIV/AIDS dan mantan PSK	<ul style="list-style-type: none"> • UU KIP Pasal 17 huruf h • UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan • Permenkes no 21 pasal 13 ttg penanggulangan HIV dan AIDS 	Sampai mendapat persetujuan dari ybs	Mengungkap rahasia pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia • Melindungi penderita dari tindakan diskriminatif dan stigmatisasi

29		Hasil diagnosa para penyandang HIV/AIDS dan mantan PSK	<ul style="list-style-type: none"> • UU KIP Pasal 17 huruf h • UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan • Permenkes no 21 pasal 13 ttg penanggulangan HIV dan AIDS 	Sampai mendapat persetujuan dari ybs	Mengungkap rahasia pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia • Melindungi penderita dari tindakan diskriminatif dan stigmatisasi
30	DINAS PUPR	Hasil laboratorium pengujian	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 pasal 17 huruf b • SNI ISO/IEC 17025:2008 bagian 4.1.5 	Tidak Terbatas	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat dan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual	Dapat menjaga objektivitas penilaian dan menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual
31	DISPORABUDPAR	Jadwal monitoring Usaha Jasa Pariwisata (UJP)	<ul style="list-style-type: none"> • UU KIP Pasal 17 huruf i 	Sampai kegiatan monitoring selesai dilaksanakan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (monitoring dapat berjalan sesuai rencana)
32		Data Identitas pelapor adanya penyimpangan pada UJP	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h dan j • UU No.20 tahun 2001 • SE Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011 	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari pelapor	Mengungkap Isi Rahasia Pribadi	Melindungi hak pelapor
33	DKP3	Dokumen Sistem Mutu (Doksitu) Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD)	UU No 14 tahun 2008 pasal 17b	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Melindungi kompetensi kelembagaan bersertifikasi

34		Hasil Uji Laboratorium keamanan pangan produk segar	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b	Sampai terbit keputusan resmi	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat
35		Hasil Uji Mutu pangan di produsen	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b	Sampai terbit keputusan resmi	Rentan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat
36	DISDALDUKKB DAN PM	Identitas korban/pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h dan j UU No.35 tahun 2014 UU No.23 Tahun 2004 UU No.31 tahun 2014 UU. No.11 tahun 2012 Perda Kota Banjrbaru No.2 Tahun 2014	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga privasi dan keamanan korban dari hal-hal yang tidak diinginkan
37	DISDAG	Dokumen Karya intelektual oleh Lembaga/swasta/kelompok/perorangan	UU KIP pasal 17 huruf b	Selama masih dalam pelaksanaan	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
38		Daftar Pembeli yang Sudah Dimiliki oleh pengusaha (eksportir tertentu)	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b	Tidak terbatas	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
39		Surat Pengajuan Hak Merek, Cipta, Paten Desain, yang sedang diproses oleh Kemenkumham	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b	Sampai dengan terbitnya hak merek,	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif

				cipta, paten, desain		
40		Dokumen perdagangan luar negeri (SKA, SPEK, Penerbitan API, dll)	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b	Tidak terbatas	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
41		Rekomendasi teknis litbang yang apabila diberikan dapat mengganggu persaingan usaha	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b	Tidak terbatas	Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Menjaga iklim usaha kondusif
42		Arsip data detail stok pangan, produk lokal dalam negeri, ketahanan ekonomi	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf b	Selama berlaku	Merugikan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga iklim usaha kondusif
43	DISDIK	Dokumen/Data terkait rencana mutasi, rotasi dan promosi pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai telah ada penetapan dari pejabat Pembina kepegawaian	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
44		Dokumen/data terkait rencana mutasi/rotasi tenaga fungsional (guru, pengawas sekolah, penilik, pamong belar, dll) di lingkungan Dinas Pendidikan	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai telah ada penetapan dari pejabat Pembina kepegawaian	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
45		Dokumen/data terkait rencana pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai telah ada penetapan dari pejabat Pembina kepegawaian	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
46		Dokumen/data proses pemilihan calon atau nominasi pegawai/guru/tenaga pendidik teladan/berprestasi di lingkungan	UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf i	Sampai ada pengumuman	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja

		Dinas Pendidikan				
47		Dokumen/bank soal ujian pada tingkatan Satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.14 tahun 2008 pasal 17 huruf j • Permendikbud No. 4 Tahun 2018 pasal 22 	Sampai dengan pelaksanaan ujian selesai	Peningkatan mutu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dan pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional tidak akan tercapai.	Pengukuran capaian kompetensi peserta didik dapat sesuai dengan standar kompetensi
48	DINSOS	Identitas Korban tindak kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h dan j • UU No.35 tahun 2014 • UU No.23 Tahun 2004 • UU No.31 tahun 2014 • UU. No.11 tahun 2012 • Perda Kota Banjarbaru No.2 Tahun 2014 	Sampai ada persetujuan tertulis dari ybs	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga privasi dan keamanan korban dari hal-hal yang tidak diinginkan
49		Alamat penampungan bagi korban tindak kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf j • UU No.31 Tahun 2015 	Sampai ada keputusan pengadilan	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga privasi dan keamanan korban dari hal-hal yang tidak diinginkan
50		Identitas penyandang HIV/AIDS dan mantan PSK	<ul style="list-style-type: none"> • UU KIP Pasal 17 huruf h • UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan • Permenkes no 21 	Sampai ada persetujuan tertulis dari ybs	Mengungkap rahasia pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia • Melindungi penderita dari tindakan

			pasal 13 ttg penanggulangan HIV dan AIDS			diskriminatif dan stigmatisasi
51		Hasil diagnosa para penyandang HIV/AIDS dan mantan PSK	<ul style="list-style-type: none"> • UU KIP Pasal 17 huruf h • UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan • Permenkes no 21 pasal 13 ttg penanggulangan HIV dan AIDS 	Sampai ada persetujuan tertulis dari ybs	Mengungkap rahasia pribadi	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia • Melindungi penderita dari tindakan diskriminatif dan stigmatisasi
52		Proses penempatan/relokasi fasilitator PNPM	<ul style="list-style-type: none"> • UU KIP Pasal 17 huruf i 	Sampai terbit SK penempatan	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
53	RSDI	Data rekam medis pasien	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h • Permenkes no 269 tahun 2008 tentang rekam medis 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
54		Data pasien safety	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 tahun 2008 pasal 17 huruf h • Permenkes No 11 tahun 2017 	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
55	SATPOLPP	Proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran hukum dan Perda	UU No 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Sampai ada putusan	Dapat menghambat proses penegakan hukum Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan	Memperlancar proses penegakan hukum dan penyusunan kebijakan (Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana)

56		Biodata pelanggar peraturan/hukum/kebijakan	UU No 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf a dan h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi	Melindung
	SETDAKO					
57	<ul style="list-style-type: none"> BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 	Dokumen penawaran kontrak barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan JAsa Pemerintah pasal 7 huruf b 	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
58		Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa	<ul style="list-style-type: none"> UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b dan j UU No.11 Tahun 2008 tentang 	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat

			<p>Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b 			dalam Pengadaan Barang/Jasa
59		Dokumen lelang dan kerjasama pemerintahan dan swasta	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b dan j • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan JAsa Pemerintah pasal 7 huruf b 	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa
60		Proses evaluasi pengadaan barang dan jasa, termasuk penyelesaian proses sengkah/banding	<ul style="list-style-type: none"> • UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 	Tidak terbatas	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain,	menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan

			<p>Transaksi Elektronik pasal 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 poin 3 huruf b dan pasal 17 huruf b dan j • Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pasal 7 huruf b 		Perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa
61	<ul style="list-style-type: none"> • BAG. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 	Dokumen penanganan perkara	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Selama proses penanganan perkara	Menghambat proses penegakan hukum	Dokumen bersifat rahasia, terutama perkara perdata, karena bila ditutup tidak dapat dimintahkan oleh pihak lawan
62		Surat/memo/catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Selama proses persidangan	Menghambat proses penegakan hukum	Kasus yang ditangani dapat diselesaikan dengan baik (Kelencaran proses penegakan hukum)
63		Kasus Hukum yang masih dalam proses	UU No.14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Selama proses persidangan	Menghambat proses penegakan hukum	Bagi pengacara negara/pemberi bantuan hukum, jika sedikit orang yang tahu, maka dapat

						lebih berkonsentrasi untuk memproses kasus yang ditangani (Kelencaran proses penegakan hukum)
--	--	--	--	--	--	---



WALIKOTA BANJARBARU,

H. NADJMI ADHANI

